

ANALISIS KESENJANGAN PERAN WARGA NEGARA KAMPUS ANTARA KESADARAN ISU, MINIMNYA SALURAN FORMAL, DAN IKLIM KETAKUTAN DI KALANGAN MAHASISWA

Muhammad Fitran Ramadhan¹, Fahrial Al Akbar Warsito Putra², Muhammad Darul
Rizqullah³, Muhammad Wira Al Fikri⁴, Danish Ayman Pratama⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Telkom

(fitranhp@gmail.com¹, fahrialalakbarwp@gmail.com², darulrizqullah15@gmail.com³,
wiraalfikri23@gmail.com⁴, danishapratama@gmail.com⁵)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesenjangan partisipasi opini formal di kalangan mahasiswa Telkom University, meskipun mereka memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu kampus. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, diwawancarai mahasiswa umum dan pers mahasiswa untuk menguji faktor penghambat partisipasi opini. Hasil menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi formal disebabkan oleh dua faktor utama: Faktor Kesadaran Saluran (ketidaktahuan masif tentang wadah opini, termasuk fitur anonimitas, di media kampus) dan Faktor Iklim Kebebasan Berpendapat (adanya chilling effect atau iklim ketakutan yang divalidasi oleh pengalaman intervensi yang dialami pers mahasiswa). Kesimpulan menyoroti bahwa peran "warga negara kampus" masih dipraktikkan melalui saluran informal ("ngobrol dengan teman" dan laporan personal ke anggota pers) sebagai respons minim risiko. Implikasi penelitian menyarankan perlunya penguatan jaminan institusional dan sosialisasi saluran formal untuk mendorong praktik kewarganegaraan yang lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Partisipasi Opini; Warga Negara Kampus; Kebebasan Berpendapat; Chilling Effect; Pers Mahasiswa.

Abstract

This study analyzes the gap in formal opinion participation among Telkom University students, despite their high awareness of campus issues. Using a descriptive qualitative approach, general students and the student press were interviewed to examine the factors inhibiting opinion participation. The results indicate that low formal participation is caused by two main factors: the Channel Awareness Factor (massive ignorance about opinion platforms, including anonymity features, in campus media) and the Freedom of Speech Climate Factor (the existence of a chilling effect or climate of fear validated by the intervention experience experienced by the student press). The conclusion highlights that the role of "campus citizen" is still practiced through informal channels (chatting with friends and personal reports to members of the press) as a low-risk



response. The implications of the study suggest the need to strengthen institutional guarantees and socialize formal channels to encourage more active, critical, and responsible citizenship practices.

Keywords: Opinion Participation; Campus Citizenship; Freedom of Speech; Chilling Effect; Student Press.

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi (PT) memiliki peran ganda: sebagai institusi pendidikan yang mencetak sumber daya manusia, dan sebagai ekosistem sosial-politik yang dikenal sebagai "negara mini". Dalam ekosistem ini, mahasiswa tidak hanya berkedudukan sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai warga negara kampus (*campus citizens*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dan memengaruhi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan akademik mereka (fasilitas, biaya, kurikulum, dll.). Partisipasi aktif ini merupakan praktik fundamental dari kewarganegaraan aktif (*active citizenship*) yang menjadi esensi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

PKn, sebagai bagian integral dari kurikulum nasional, bertujuan membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Studi terdahulu (Revani et al., 2025; Sumarno & Yulianto, 2020) mengonfirmasi bahwa PKn yang efektif secara signifikan memengaruhi pola pikir dan partisipasi aktivisme mahasiswa. Ini termasuk kemampuan mengidentifikasi masalah, berpikir kritis, dan mencari solusi logis (Siregar, 2024).

Namun, observasi awal di Telkom University menunjukkan anomali. Meskipun mahasiswa secara kolektif merasakan dampak signifikan dari kebijakan kampus (dampak kebijakan diukur rata-rata 4 hingga 5 dari 5), tingkat partisipasi mereka dalam menyalurkan opini atau kritik secara formal terlihat rendah. Partisipasi yang rendah ini di tengah tingginya kesadaran isu mengindikasikan adanya kesenjangan peran warga negara. Kesenjangan ini berpotensi menciptakan iklim apatisme dan kegagalan fungsi PT sebagai laboratorium demokrasi.

Urgensi penelitian ini terletak pada analisis akar masalah kesenjangan tersebut, yaitu faktor "Jaminan Hukum dalam Kebebasan Berpendapat" dan "Ketersediaan Saluran". Penelitian ini akan menganalisis fenomena *chilling effect* yang ditimbulkan oleh ketakutan akan konsekuensi negatif, sebuah temuan yang divalidasi oleh pengalaman intervensi yang dialami pers mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana mahasiswa memaknai dan menjalankan perannya sebagai warga negara kampus dalam konteks kehidupan akademik yang semakin kompleks. Pertama, penelitian ini berfokus pada analisis tingkat kesadaran



mahasiswa terhadap hak, tanggung jawab, dan kapasitas mereka sebagai bagian dari komunitas kampus. Kesadaran ini mencakup pemahaman mengenai ruang partisipasi, mekanisme penyampaian aspirasi, serta peran mahasiswa dalam menjaga keberlangsungan budaya demokratis di lingkungan pendidikan tinggi.

Kedua, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor operasional dan kultural yang dapat menghambat partisipasi opini formal mahasiswa. Faktor operasional merujuk pada efektivitas dan keterjangkauan saluran resmi seperti forum kemahasiswaan, unit kegiatan, atau perangkat birokrasi kampus. Sementara itu, faktor kultural mencakup kondisi iklim kebebasan berpendapat, persepsi terhadap risiko sosial maupun akademik, serta norma yang berkembang mengenai ekspresi politik dan sikap kritis. Kedua aspek ini penting untuk dipahami karena dapat menciptakan hambatan yang tidak selalu tampak secara struktural tetapi dirasakan dalam praktik sehari-hari.

Ketiga, penelitian ini menganalisis praktik civic engagement mahasiswa sebagai respons terhadap chilling effect, yaitu situasi ketika individu menahan diri untuk berpartisipasi karena kekhawatiran akan konsekuensi negatif. Dalam konteks ini, penelitian menelaah bagaimana mahasiswa menegosiasikan ruang ekspresi dengan memilih saluran alternatif atau informal misalnya melalui komunitas kecil, media sosial tertentu, atau diskusi privat untuk tetap menyuarakan pandangan mereka. Melalui kajian ini, penelitian diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih luas tentang dinamika partisipasi mahasiswa dalam ekosistem demokrasi kampus.

Konsep warga negara kampus (Assad & Ali, 2025) menekankan bahwa mahasiswa tidak sekadar "pelanggan" layanan pendidikan, melainkan "warga" dari sebuah komunitas. Sebagai warga, mereka memiliki hak (termasuk hak untuk berpendapat dan mendapatkan informasi, sesuai UUD 1945 Pasal 28F) dan kewajiban untuk berkontribusi pada tata kelola kampus.

Partisipasi Opini adalah salah satu bentuk *civic participation* yang paling fundamental. Dalam konteks kampus, ini dapat berupa kritik, saran, atau usulan kebijakan yang disampaikan melalui saluran formal (misalnya, media kampus, *town hall meeting*, Dewan Perwakilan Mahasiswa). Rendahnya partisipasi opini formal menandakan adanya *barriers to engagement* (Crabtree, 2023), yang dapat berupa hambatan finansial, kurangnya dukungan, atau hambatan emosional (rasa takut).

PKn berperan vital dalam mengembangkan *civic skills* dan *civic disposition*. Keberhasilan PKn diukur dari sejauh mana mahasiswa mampu:

1. Berpikir Kritis: Mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi masalah sosial (Siregar, 2024).
2. Keterlibatan Aktif: Mengambil peran dalam aktivitas sosial-politik (Revani et al., 2025).



Dalam konteks penelitian ini, temuan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran isu yang tinggi menunjukkan keberhasilan PKn di tingkat kognitif. Namun, kegagalan dalam menerjemahkannya menjadi partisipasi formal menunjukkan adanya hambatan antara kognisi kewarganegaraan dan aksi kewarganegaraan. Tugas PKn di perguruan tinggi adalah menjembatani kesenjangan ini dengan mendorong pengalaman *civic engagement* yang nyata.

Dasar Hukum Indonesia: Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan diatur lebih lanjut oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Untuk pers kampus, prinsip-prinsip UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) (Independen, Faktual, Tanggung Jawab Profesional) seharusnya menjadi pedoman, bahkan jika status hukum mereka adalah pers mahasiswa yang tidak terikat penuh pada undang-undang pers.

Peran Institusi dan *Chilling Effect*: Hutchens & Labanc (2022) menekankan bahwa kebebasan berbicara di lingkungan akademik, terutama di institusi publik, tidak hanya tentang "aturan" hukum, tetapi tentang ekosistem pidato yang holistik. Meskipun Telkom University adalah perguruan tinggi swasta, standar etika akademik menuntut adanya ekosistem yang melindungi hak berpendapat.

Chilling Effect adalah istilah yang menggambarkan penahanan diri untuk menyuarakan kritik karena kekhawatiran yang beralasan akan konsekuensi negatif. Jika mahasiswa dan pers mahasiswa merasa terancam intervensi institusional, mereka secara rasional akan membatasi pidato mereka, yang pada akhirnya merusak iklim akademik dan fungsi kritis mahasiswa.

Konsep Bela Negara (Masruroh et al., 2024; Karim & Widayati, 2024) tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dalam upaya menjaga keutuhan bangsa. Dalam konteks kampus dan masyarakat, Bela Negara diwujudkan melalui:

1. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara: Termasuk kritik konstruktif terhadap penyelenggaraan negara/institusi.
2. Rela Berkorban: Termasuk mengorbankan kenyamanan pribadi untuk kepentingan publik (kampus).

Partisipasi opini kritis adalah bentuk Bela Negara non-militer di lingkungan kampus. Dengan menyuarakan kritik terhadap kebijakan kampus (fasilitas, transparansi, dll.), mahasiswa sebenarnya sedang berupaya menjaga *ketahanan internal* institusi dari kelemahan atau potensi korupsi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif



dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam (in-depth) dan holistik, yang berfokus pada makna subjektif yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap perilaku dan pengalaman mereka (Sugiyono, 2020). Desain deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik populasi subjek, yaitu menguraikan secara rinci faktor-faktor penghambat partisipasi opini mahasiswa di Telkom University.

Fokus penelitian kualitatif ini adalah pada:

1. Fenomena: Kesenjangan antara kesadaran isu dan tingkat partisipasi opini formal.
2. Makna Subjektif: Persepsi mahasiswa umum terhadap "rasa aman" dan "kekhawatiran konsekuensi negatif" (chilling effect) yang menjadi kunci interpretasi rendahnya partisipasi.

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di lingkungan Telkom University, Bandung, yang merupakan representasi dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) besar di Indonesia dengan ekosistem akademik dan birokrasi yang padat. Waktu pengumpulan data primer dilakukan selama satu semester akademik (disebutkan secara spesifik jika ada).

Subjek Penelitian dan Teknik Sampling Subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok utama dengan teknik pengambilan sampel yang berbeda, yaitu Purposive Sampling dan Convenience Sampling.

Mahasiswa Umum (Populasi Target): Diambil menggunakan convenience sampling dan/atau quota sampling sederhana dari berbagai fakultas dan angkatan (2022, 2023, 2024). Kriteria inklusi utama adalah mahasiswa yang aktif mengikuti isu kampus dan bersedia memberikan opini kritis. Data awal dikumpulkan melalui angket untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran isu dan persepsi dampak kebijakan (faktor kuantitatif pendukung).

Pers Mahasiswa (*Key Informants*): Diambil menggunakan purposive sampling. Subjek dipilih dari anggota aktif Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UKM Aksara yang secara langsung bertanggung jawab atas rubrik opini dan berita kritis. Mereka adalah key informants yang berfungsi untuk memvalidasi data subjektif mahasiswa umum (misalnya, memverifikasi apakah ada intervensi dan seberapa sering opini masuk).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: Angket (Data Kuantitatif Pendahuluan): Digunakan untuk mengukur variabel terukur secara kuantitatif sederhana, seperti:

1. Tingkat persepsi dampak kebijakan kampus (skala 1–5).
2. Frekuensi kepemilikan opini.
3. Frekuensi mengikuti isu kampus.

Angket ini berfungsi sebagai basis untuk mengidentifikasi adanya



kesenjangan sebelum masuk ke analisis kualitatif yang mendalam.

Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data kualitatif primer untuk menggali pengalaman, persepsi, dan dinamika yang tidak dapat ditangkap sepenuhnya melalui angket. Teknik ini memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam jawaban responden, sekaligus tetap mempertahankan kerangka pertanyaan yang sistematis. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap dua kelompok subjek penelitian, yaitu mahasiswa sebagai pengirim atau calon pengirim opini, serta pihak pers mahasiswa yang berperan sebagai pengelola saluran publikasi.

Protokol wawancara disusun berdasarkan temuan awal dari angket, sehingga setiap pertanyaan diarahkan untuk mengurai konteks, alasan, dan kondisi yang melatarbelakangi data kuantitatif tersebut. Misalnya, jika angket menunjukkan rendahnya tingkat penyampaian opini secara formal, maka wawancara mendalami faktor apa saja yang menghambat mahasiswa, bagaimana mereka menilai risiko yang mungkin muncul, serta bagaimana mereka memaknai peran pers mahasiswa dalam ekosistem demokrasi kampus.

Selain itu, wawancara juga bertujuan menangkap narasi emosional dan pengalaman personal responden, seperti

bentuk tekanan, ketidakpastian, atau ketakutan yang mungkin tidak terungkap dalam jawaban tertulis. Pendekatan naratif ini memungkinkan peneliti memahami lebih holistik hubungan antara persepsi, budaya komunikasi, dan praktik partisipasi mahasiswa. Hasil wawancara kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tema, serta titik-titik ketidaksinkronan antara persepsi mahasiswa dan realitas institusional.

Mahasiswa Umum: Pertanyaan berfokus pada: alasan kegagalan penyampaian opini, pengetahuan tentang saluran formal (media kampus), dan pengalaman atau kekhawatiran pribadi terkait konsekuensi kritik (untuk menguji chilling effect).

Pers Mahasiswa: Pertanyaan berfokus pada: volume opini yang masuk, mekanisme perlindungan identitas (anonimitas), dan pengalaman nyata terkait intervensi atau hambatan dari birokrasi kampus (untuk memverifikasi chilling effect).

Dokumentasi dan Studi Literatur: Dokumen internal (seperti notula Rapat Isu Aksara/RAISA) dan literatur relevan (seperti UU Pers, KEJ, UU No. 9/1998, dan jurnal tentang Civic Engagement dan Bela Negara) digunakan sebagai acuan normatif dan konseptual untuk menafsirkan temuan lapangan.

Data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga alur



kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan:

Reduksi Data (Data Reduction): Data hasil wawancara yang masih mentah (transkrip) disederhanakan, diseleksi, dan difokuskan pada tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian (kesadaran, saluran, chilling effect). Misalnya, semua jawaban yang mengarah pada "takut" atau "intervensi" dikelompokkan menjadi tema Chilling Effect.

Penyajian data (Data Display) dalam penelitian ini dilakukan setelah proses reduksi data, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih fokus, terstruktur, dan mudah dianalisis. Data disajikan dalam berbagai bentuk, termasuk narasi deskriptif, matriks komparatif, serta kutipan (quotes) terpilih dari wawancara yang representatif. Penyajian data secara komprehensif ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan perbedaan antara persepsi Mahasiswa Umum dan realitas yang dialami Pers Mahasiswa. Dengan pendekatan ini, dua temuan utama muncul, yaitu "Kesenjangan Saluran", yang menggambarkan rendahnya pemanfaatan saluran formal oleh mahasiswa meskipun saluran tersebut tersedia, dan "Kesenjangan Iklim", yang menunjukkan adanya hambatan psikologis atau budaya seperti rasa takut atau ketidakpastian yang menghalangi partisipasi formal.

Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) dilakukan secara bertahap, dimulai sejak fase awal penelitian. Setiap temuan awal diuji kembali dengan data baru, baik dari angket maupun wawancara, untuk memastikan konsistensi dan validitas. Proses iteratif ini memungkinkan peneliti memverifikasi pola-pola yang muncul, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan menegaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel. Dengan cara ini, kesimpulan yang diambil bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap dinamika sosial yang kompleks, memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi formal mahasiswa dalam ekosistem kampus.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua bentuk triangulasi, yaitu Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik, untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh dua kelompok utama: Mahasiswa Umum dan Pers Mahasiswa. Mahasiswa Umum memberikan data berupa persepsi, pengalaman subjektif, serta tingkat kenyamanan mereka dalam menyampaikan opini secara formal. Sebaliknya, Pers Mahasiswa memberikan



data faktual mengenai realitas operasional, termasuk keberadaan saluran opini, mekanisme perlindungan identitas, serta bentuk-bentuk intervensi atau tekanan birokrasi yang pernah mereka alami.

Perbandingan kedua sudut pandang ini menjadi krusial, terutama dalam menguji fenomena chilling effect di kampus. Ketika persepsi mahasiswa mengenai adanya risiko atau ketakutan berpartisipasi ternyata sejalan dengan bukti intervensi yang dialami pers mahasiswa, konsistensi tersebut memperkuat validitas temuan bahwa hambatan partisipasi bukan semata persepsi individual, tetapi berakar pada kondisi struktural yang nyata.

Sementara itu, Triangulasi Teknik dilakukan dengan membandingkan hasil angket dan wawancara. Data kuantitatif memberikan gambaran pola umum, sedangkan wawancara mengungkap konteks mendalam di balik angka-angka tersebut. Menggabungkan keduanya memungkinkan peneliti menyusun interpretasi yang lebih komprehensif dan mendalam, sehingga temuan penelitian memiliki kekuatan analisis yang lebih solid.

Triangulasi teknik digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan keabsahan data sekaligus memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perilaku partisipasi opini mahasiswa. Teknik ini dilakukan dengan

membandingkan serta menghubungkan temuan dari dua sumber utama: angket sebagai instrumen kuantitatif dan wawancara semi-terstruktur sebagai instrumen kualitatif. Melalui angket, peneliti memperoleh pola umum yang bersifat terukur, misalnya tingkat kesadaran isu mahasiswa yang terbukti tinggi dan frekuensi kemunculan opini terkait isu kampus. Data ini memberikan gambaran makro mengenai kondisi populasi.

Namun, angka-angka dari angket tidak cukup untuk menjelaskan alasan mendalam di balik rendahnya partisipasi formal. Di sinilah wawancara berperan melengkapi. Melalui wawancara, peneliti mampu menangkap konteks personal, dinamika emosional, serta detail yang tidak muncul dalam jawaban terstruktur, seperti rasa takut terhadap intervensi birokrasi, ketidaktahuan mengenai saluran pengiriman opini, atau anggapan bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh.

Dengan membandingkan kedua jenis data tersebut, peneliti dapat melihat area konsistensi dan ketidaksesuaian. Misalnya, meskipun angket menunjukkan mahasiswa memiliki opini yang sering muncul, wawancara mengungkap adanya hambatan operasional dan kultural yang membuat opini tersebut tidak disampaikan secara formal. Proses triangulasi ini menghasilkan analisis yang lebih kaya, valid, dan komprehensif,



sehingga temuan penelitian memiliki kekuatan interpretatif yang lebih baik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Telkom University memiliki tingkat kesadaran isu yang tinggi dan merasakan dampak kebijakan kampus pada level yang signifikan (rata-rata 4 hingga 5 dari 5). Opini untuk menanggapi isu-isu kampus juga sering muncul.

"Apakah kamu merasa terlibat dalam penentuan birokrasi/kebijakan kampus? jika ya, lewat apa? - Tidak" "Seberapa sering kamu punya opini untuk menanggapi isu-isu kampus? - Sering/Cukup Sering" "- apakah tersampaikan? jika tidak, kenapa? - Tidak, karena saya hanya sebatas mengeluhkan isu-isunya."

Data dari pers mahasiswa mengonfirmasi hal ini: kiriman opini formal (rubrik "Pojok Aksara") dinilai "sangat jarang", sementara isu-isu kritis internal kampus mendominasi diskusi internal redaksi (Rapat Isu Aksara/RAISA), namun tidak terekspos ke publik melalui artikel opini eksternal.

Pembahasan: Diskoneksi ini adalah inti dari kesenjangan peran warga negara kampus. Mahasiswa bertindak sebagai konsumen yang menyadari cacat produk, tetapi tidak sebagai warga negara yang berupaya memperbaiki tata kelola. Berdasarkan teori Civic Participation, hal ini menunjukkan bahwa tahap

keterlibatan kognitif berhasil, tetapi tahap keterlibatan perilaku terhambat.

Alasan utama yang diberikan mahasiswa umum mengapa opini mereka tidak tersampaikan secara formal adalah "tidak tahu wadah yang tepat".

"Tau ga kalo pers kampus ini (...) menyediakan wadah untuk menyampaikan opini (bahkan secara anonim, ada perlindungan identitas)? - Belum tahu sebelumnya."

Faktanya, pers mahasiswa (UKM Aksara) menyatakan mereka menyediakan saluran terbuka (Pojok Aksara, DM Instagram) dan memiliki mekanisme perlindungan identitas (nama pena, proses redaksi).

Ini menunjukkan defisit sosialisasi yang masif. Ada supply saluran yang dijamin anonimitasnya, tetapi demand mahasiswa tidak bertemu karena kegagalan komunikasi. Mahasiswa cenderung berpendapat melalui media sosial atau "ngobrol lewat teman," yang menunjukkan bahwa isu saluran bersifat operasional (bagaimana cara menyampaikan) dan bukan murni motivasi (apakah ingin menyampaikan). Peran Bahasa Indonesia (Tambunan et al., 2025) sebagai alat komunikasi kewarganegaraan menjadi tidak efektif jika medium penyalurannya tidak diketahui atau diakses.

Hambatan kedua dan yang paling fundamental adalah iklim ketakutan.



Mahasiswa umum menyatakannya dengan kehati-hatian:

"Secara pribadi, sejauh mana kamu merasa aman dan bebas untuk menyampaikan pendapat atau kritik? - Merasa aman, tapi harus berhati-hati. Khawatir menyinggung pihak tertentu."

Ketakutan ini dikonfirmasi dan diperkuat oleh pengalaman pers mahasiswa:

"Apakah UKM Aksara pernah mengalami hambatan, intervensi, atau 'teguran'? - Pernah. LPM mana yang nggak pernah diintervensi? Nggak ada." "Apakah kamu (...) merasa ada 'jaminan hukum' atau perlindungan institusional yang jelas? - 50/50 ya, karena kebebasan pers jelas dilindungi UUD, tapi kami bukan jurnalis profesional, melainkan pers mahasiswa yang masih di bawah asuhan kemahasiswaan."

Adanya intervensi yang dikonfirmasi oleh pers mahasiswa secara empiris memvalidasi chilling effect yang dirasakan mahasiswa umum. Ini adalah masalah Institusional Governance. Hutchens & Labanc (2022) menyarankan bahwa institusi harus memiliki ekosistem pidato yang holistik, yang di sini tidak terwujud. Perlindungan yang dirasakan 50/50 dan bersifat personal (tergantung Pembina) membuat kebebasan berpendapat menjadi rezim berbasis relasi bukan rezim berbasis aturan hukum. Ketika risiko personal menjadi tinggi, rasionalitas individu adalah untuk menghindari risiko.

Menariknya, meskipun partisipasi formal rendah, mahasiswa memilih alternatif:

"- lewat apa? - Ngobrol sama teman (bukan berarti juga tersampaikan, hanya sebatas ingin menanggapi dengan bercerita ke teman saja). Laporan personal ke anggota pers."

Ngobrol dengan teman merupakan bentuk partisipasi informal yang memiliki risiko rendah (low-risk), karena mahasiswa dapat mengekspresikan opini atau kritik tanpa menghadapi konsekuensi langsung dari birokrasi kampus. Aktivitas ini berfungsi sebagai mekanisme kompensasi untuk tetap menjalankan peran sebagai warga negara kampus, sekaligus menghindari chilling effect yang mungkin timbul dari jalur formal. Dengan cara ini, tanggung jawab penyaluran kritik secara resmi dialihkan dari jalur formal ke jalur personal, sehingga mahasiswa tetap aktif berpartisipasi secara kognitif, meskipun keterlibatan perilaku formal mereka terbatas.

Bagi pers mahasiswa, fenomena ini memunculkan peran penting sebagai penampung risiko (risk absorber). Banyaknya laporan informal yang diterima diperkirakan lebih dari 30 isu dalam satu semester diolah secara internal di dapur redaksi sebelum diputuskan apakah layak dipublikasikan secara formal. Proses ini menunjukkan peran strategis pers mahasiswa dalam menyeimbangkan antara penyampaian kritik dan perlindungan terhadap pelapor.

Namun, mekanisme informal ini memiliki konsekuensi. Penggunaan jalur



personal mengurangi transparansi dan membatasi kebebasan berekspresi secara langsung, karena opini tidak tersalurkan secara publik dan tidak menciptakan rekam jejak institusional. Dengan demikian, meskipun mahasiswa tetap berpartisipasi, kualitas partisipasi formal dan kontribusi mereka terhadap tata kelola kampus menjadi terbatas, menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi dan pemanfaatan saluran resmi yang ada.

Temuan ini relevan dengan studi tentang peran organisasi mahasiswa dalam penguatan civic participation (Yoshie et al., 2025). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa organisasi (seperti WMPM di Unram) secara signifikan menguatkan civic skills dan peran warga negara mahasiswa.

Sebaliknya, temuan di Telkom University menunjukkan:

Temuan di Telkom University menunjukkan adanya dinamika yang kompleks terkait hubungan antara intervensi organisasi dan partisipasi warga negara mahasiswa. Ketika organisasi mediasi, dalam hal ini pers mahasiswa, mengalami intervensi dari pihak birokrasi atau pihak berwenang lainnya, fungsi utamanya sebagai wadah penguatan civic participation menjadi terganggu. Pers mahasiswa seharusnya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan opini kritis, melatih keterampilan komunikasi, dan membangun kesadaran politik atau sosial secara kolektif. Namun, intervensi yang

terjadi mengubah peran organisasi ini menjadi lebih defensif, sehingga fokus utamanya bergeser dari pemberdayaan partisipasi aktif ke upaya mengurangi risiko bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan kritik.

Akibatnya, bukannya memperkuat kapasitas warga negara, intervensi ini justru memperkuat pola penghindaran risiko. Mahasiswa menjadi lebih cenderung memilih jalur informal atau pribadi untuk menyampaikan kritik, seperti berdiskusi dengan teman dekat, daripada menggunakan saluran resmi yang tersedia. Fenomena ini menciptakan kesenjangan partisipasi, di mana kesadaran dan pengetahuan mahasiswa tinggi, tetapi keterlibatan perilaku formal rendah.

Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan organisasi mediasi tidak cukup untuk mendorong partisipasi aktif; kualitas perlindungan institusional dan kebebasan berekspresi yang nyata sangat menentukan efektivitasnya. Untuk membangun ekosistem akademik yang demokratis, perlu adanya penguatan jaminan independensi organisasi dan mekanisme yang meminimalkan intervensi eksternal, sehingga peran pers mahasiswa sebagai mediator civic participation dapat berjalan optimal.

Defisit Implementasi Bela Negara: Partisipasi opini yang pasif-informal menjadi indikasi kurangnya aspek "rela



berkorban untuk kepentingan umum" dalam praktik Bela Negara (Karim & Widayati, 2024). Mahasiswa tidak mengambil risiko personal untuk tujuan kolektif (memperbaiki kebijakan kampus), menunjukkan bahwa nilai-nilai Bela Negara perlu diintegrasikan ke dalam tindakan nyata, bukan sekadar pemahaman kognitif. Penguatan nilai Bela Negara tidak dapat dipisahkan dari jaminan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Temuan ini memberikan kontras tajam terhadap studi yang menunjukkan keberhasilan penguatan civic participation melalui organisasi mahasiswa (Yoshie et al., 2025). Dalam konteks Telkom University, organisasi mediasi (pers mahasiswa) yang seharusnya menjadi wadah penguatan peran warga negara justru menjadi subjek intervensi.

Implikasinya terhadap Bela Negara (Karim & Widayati, 2024; Masruroh et al., 2024) juga penting. Partisipasi yang pasif-informal mencerminkan kurangnya dimensi "rela berkorban" untuk kepentingan kolektif kampus. Bela Negara yang sesungguhnya menuntut keberanian untuk menyampaikan kritik konstruktif sebuah tindakan yang secara sadar mengambil risiko personal untuk menjaga kesehatan institusi yang saat ini sedang gagal dicapai di lingkungan kampus ini. Penguatan nilai Bela Negara harus paralel dengan penguatan jaminan hak

berpendapat, karena kritik adalah wujud tanggung jawab kewarganegaraan, bukan tindakan subversif.

D. Penutup

Rendahnya partisipasi opini formal mahasiswa Telkom University adalah hasil dari interaksi antara faktor operasional (kegagalan sosialisasi saluran) dan faktor kultural (iklim ketakutan/chilling effect). Mahasiswa memiliki kesadaran isu yang tinggi (keberhasilan PKn di tingkat kognitif), tetapi memilih mekanisme kompensasi risiko (partisipasi informal) yang menghambat mereka dari praktik kewarganegaraan yang aktif dan formal. Intervensi yang dialami pers mahasiswa merupakan bukti nyata yang memvalidasi ketakutan ini, membuat jaminan kebebasan berpendapat menjadi lemah dan personal, bukan institusional. Hal ini juga menunjukkan adanya defisit dalam penguatan peran organisasi mahasiswa sebagai wadah *civic participation* dan dalam implementasi nilai-nilai Bela Negara di lingkungan kampus.

Untuk mengatasi kesenjangan peran warga negara dan membangun ekosistem akademik yang lebih demokratis, diperlukan intervensi pada tiga level:

1. Untuk Birokrasi Kampus (Rektorat/Kemahasiswaan): Penguatan Jaminan Institusional

Deklarasi Piagam Kebebasan Akademik dan Berekspresi: Menerbitkan dokumen kebijakan institusional yang



secara eksplisit menjamin perlindungan bagi pers mahasiswa dan kontributor opini kritis. Perlindungan ini harus berbasis aturan, bukan relasi personal dengan Pembina UKM, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum kebebasan berpendapat di Indonesia (UU No. 9/1998).

Adopsi Prosedur Dewan Pers: Mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa konten yang transparan (misalnya, hak jawab, batas waktu koreksi 2x24 jam), menjadikan proses lebih berbasis Kode Etik Jurnalistik (KEJ) daripada intervensi sepihak. Hal ini akan mengurangi chilling effect dan meningkatkan rasa aman.

2. Untuk Pers Mahasiswa (UKM Aksara, Lokatara, T-Radio): Peningkatan Kesadaran Saluran

Kampanye Sosialisasi Berulang: Meluncurkan kampanye yang secara eksplisit dan berulang-ulang menyosialisasikan wadah opini formal (Pojok Aksara, dll.) dan secara jelas menyebutkan fitur anonimitas/nama pena serta mekanisme perlindungan identitas yang mereka tawarkan.

Menjembatani Informal ke Formal: Menggunakan data laporan informal (mouth to mouth) yang mereka terima (lebih dari 30 isu per semester) sebagai dasar untuk memproduksi artikel yang ditulis oleh tim redaksi dengan status anonim atau nama pena redaksi, sehingga mengalihkan burden of risk dari

mahasiswa umum ke institusi pers mahasiswa, sembari tetap menyalurkan aspirasi.

3. Untuk Dosen Mata Kuliah PKn/Kewarganegaraan: Integrasi Aksi dan Teori

Proyek Civic Engagement Wajib: Merevisi kurikulum untuk memasukkan tugas yang mewajibkan mahasiswa berpartisipasi dalam saluran formal, misalnya, menulis artikel opini anonim untuk media kampus, atau membuat kajian/petisi yang ditujukan kepada birokrasi. Hal ini akan mewujudkan integrasi teori PKn (hak dan kewajiban warga negara) dengan praktik nyata (civic action).

Integrasi Nilai Bela Negara dan Opini Kritis: Mengajarkan bahwa kritik konstruktif terhadap institusi (kampus) adalah bagian dari Ketahanan Internal dan Bela Negara non-militer. Kritik adalah bentuk tanggung jawab, bukan perlawanan.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan terbatas pada satu institusi; oleh karena itu, penelitian di masa depan perlu menjajaki aspek kausalitas dan perbandingan untuk memperdalam pemahaman mengenai chilling effect dan partisipasi opini di Perguruan Tinggi.

Studi Komparatif Institusional (PTN vs. PTS): Melakukan penelitian perbandingan antara institusi negeri (PTN) yang secara hukum terikat pada kebebasan berpendapat dengan institusi



swasta (PTS) untuk menguji sejauh mana model perlindungan berbasis regulasi formal (PTN) berbeda dalam menciptakan iklim kebebasan dibandingkan model perlindungan berbasis otonomi institusional (PTS).

Studi Longitudinal dan Intervensi: Menggunakan desain penelitian longitudinal untuk mengukur perubahan tingkat partisipasi opini formal (misalnya, jumlah kiriman ke Pojok Aksara) sebelum dan sesudah implementasi program sosialisasi saluran dan deklarasi jaminan institusional, guna menguji efektivitas program intervensi dalam mengatasi chilling effect.

Eksplorasi Perspektif Birokrasi: Mengalihkan fokus penelitian dari mahasiswa (sebagai korban) ke pihak pengambil keputusan (birokrasi dan pimpinan Ormawa) untuk memahami motivasi, alasan, dan mekanisme pengambilan keputusan di balik intervensi atau teguran yang diberikan kepada pers mahasiswa.

Analisis Efikasi Mekanisme Anonimitas: Meneliti secara mendalam efektivitas dan kepercayaan mahasiswa terhadap mekanisme anonimitas yang ditawarkan oleh pers kampus, karena rendahnya kesadaran terhadap fitur ini menjadi hambatan operasional utama.

E. Daftar Pustaka

Biddix, J. P. 2010. "Civic Engagement in Higher Education." The ASHE Higher Education Report Series 35(6): 67–83.

Crabtree, Ruth. 2023. "Barriers to Student Engagement: Why Don't University Students Engage?" Student Engagement in Higher Education Journal 4(3): 28–47.

Data Hasil Wawancara dan Angket Telkom University (UKM Aksara dan Mahasiswa Umum). 2025. Unpublished raw data.

Harefa, D. (2025). Implementation Of Pancasila Character Education In Hombo Batu In South Nias. CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. 6(1), 1-13, <https://doi.org/10.57094/jpkn.v6i1.2566>

Hutchens, Neal H., and Brandi Hephner Labanc. n.d. "Talking about Free Speech on Campus: Legal Standards and Beyond." Journal of College and University Law 49(2): 227–258.

Indonesia. 1998. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Indonesia. n.d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karim, Abdul, and Sri Widayati. 2024. "Membangun Kesadaran Mahasiswa dalam Bela Negara untuk



- Mewujudkan Ketahanan Nasional." Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan 12(02): 1–8.
- Masruroh, D. R., F. R. Kholifaturrohmah, Najmudin, and N. D. W. Sukendro. 2024. "Membangun Kesadaran Bela Negara di Kalangan Mahasiswa." CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 9(6).
- Revani, Claudia, Lutfi Bunga, Salsa Rohimah, and Supriyono. 2025. "Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Aktivisme Mahasiswa." Jurnal Pendidikan Tambusai 9(1): 2702–2706.
- Siregar, Hapni Laila. 2024. "Analisis Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam." IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam 2(2): 134–150.
- Sumarno, H., and A. Yulianto. 2020. "Partisipasi Sosial Mahasiswa dalam Aktivisme Politik: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Sosial." Jurnal Ilmu Pendidikan 21(3): 110–120.
- Tambunan, K. A. H., R. A. Siagian, S. Harianti, and T. Hutagalung. 2025. "Peran Bahasa Indonesia dalam Meningkatkan Kesadaran Kewarganegaraan di Kalangan Pelajar." Jurnal Pendidikan Tambusai 9(1): 8893–8899.
- Ubaedillah, A. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana.
- Watfa, Ali Assad, and Driss Ait Ali. 2025. "From National Loyalty to Student Political Participation: The Mediating Effect of University Citizenship Promotion." *Frontiers in Education* 10: 1600175.
- Yoshie R. A., L. R., M. Mustari, Sawaludin, and E. Kurniawansyah. 2025. "Penguatan Civic Participation Mahasiswa Melalui Organisasi Wahana Mahasiswa Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 6(3).

